

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arwiyah dan M. Yahya H., dkk., *Regulasi Kewarganegaraan Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2023).

Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003).

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007).

Sudarsono, *Hukum dan Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

R. Herlambang P. Wiratraman, Mengapa Dwi-Kewarganegaraan Harus Dilindungi dalam Sistem Hukum Indonesia? Pendekatan Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia (Team Penyusun Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, 2021).

Sri Mamudji, dkk., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), sebagaimana dikutip dalam Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Banten: Penerbit Universitas Pamulang/UNPAM Press, 2018).

Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Edisi ke-3 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017).

JURNAL

A. M. Putri, “*Statelessness* Akibat Konflik Hukum Kewarganegaraan di Indonesia,” Jurnal Hukum Internasional Vol. 17 No. 1 (2020).

A. Suryono, “Dwikewarganegaraan dan Kewajiban Memilih Kewarganegaraan pada Usia Dewasa,” Jurnal Hukum Negeri Vol. 22 No. 4 (2015).

Atika S. Dewi dan Isdiana Syafitri, “Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya,” Juripol Vol. 5 No. 1 (2022).

B. Kurniawan, “Dwikewarganegaraan dan Hak Politik Warga Negara Indonesia,” Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 11 No. 3 (2016).

D. Suryadarma, “Asas Ius Sanguinis dan Implikasinya terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran dalam Hukum Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Vol. 25 No. 2 (2018).

D. Wahyuni, “Asas Ius Sanguinis dan Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Campuran,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 (2021).

Elly, E., “Perubahan Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Dari UU No. 62 Tahun 1958 ke UU No. 12 Tahun 2006,” *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 12 No. 1 (2016).

Herni Widanarti, “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak,” Vol. 4 No. 1 (Februari 2019).

N. Naswar, “Status Anak dalam Perkawinan Campuran,” *Jurnal Litigasi* Vol. 25 No. 2 (2024).

L. Sari, “Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum Gender* Vol. 8 No. 1 (2021).

R. Prasetyo, “Dual Citizenship dan Hak Anak dalam Perkawinan Campuran Menurut UU No. 12 Tahun 2006,” *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 5 No. 2 (2017).

Y. Suryana, “Pembentukan Identitas Nasional melalui Hukum Kewarganegaraan Pascakolonial,” *Jurnal Studi Politik dan Hukum* Vol. 18 No. 1 (2019).

Z. Anwar, “Asas Patrilineal dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Tinjauan Kritik Gender,” *Jurnal Hukum dan Perempuan* Vol. 10 No. 3 (2015).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 4 huruf c dan d.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 7 Convention on the Rights of the Child.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

LAMPIRAN